



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2025/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MANGARA M. SIMARMATA**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **194732**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.754.100.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 820.000.000
2. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 522 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
5. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KARIMUN, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
6. Tanah Seluas 541 m2 di KAB / KOTA KARIMUN, HASIL SENDIRI Rp. 54.100.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 560.000.000

1. MOBIL, SUZUKI CARRY PICK UP Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000



2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
190.000.000
3. MOBIL, HYUNDAI CRETA PRIME 1.5 Tahun 2022, HASIL
SENDIRI Rp. 320.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	621.429.644
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.935.529.644

III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.935.529.644

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.